

Analisis Peran Sastra sebagai Media Kritik Korupsi dan Cermin Realitas Sosial dalam Novel "Negeri Para Bedebah" melalui Perspektif Sosiologi Sastra

Najwa Shokhifatul Maula^{1✉}, Muhammad Rakha Adiyatma², Kian Imani Syah Praptadigena³, Muhammad Jafar⁴, Alima Floretta Davina Azhar⁵, Muhamad Ihsan⁶, & Abid Muzamil⁷

¹⁻⁷ Sastra Inggris, Universitas Negeri Semarang

*Correspondence to: najwashfm@students.unnes.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran sastra sebagai media untuk mengkritik korupsi serta refleksi realitas sosial dalam novel "Negeri Para Bedebah" karya Tere Liye melalui perspektif sosiologi sastra. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin relevannya karya sastra dalam merepresentasikan fenomena sosial dan politik, khususnya praktik korupsi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana novel tersebut menggambarkan praktik korupsi dan merefleksikan kondisi sosial melalui alur cerita dan karakternya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra melalui analisis tekstual. Temuan menunjukkan bahwa novel tersebut berhasil menggambarkan korupsi sebagai isu sistemik yang melibatkan relasi kekuasaan, sekaligus menyajikan ketidaksetaraan sosial dan degradasi moral dalam masyarakat. Diskusi juga menyoroti bagaimana penulis menggunakan penceritaan sebagai sarana kritik sosial yang efektif terhadap sistem yang korup. Kesimpulannya, "Negeri Para Bedebah" berfungsi tidak hanya sebagai karya sastra tetapi juga sebagai media kritik sosial yang merefleksikan kondisi kehidupan nyata dan mendorong pembaca untuk lebih sadar akan isu-isu korupsi dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Korupsi, Sastra, Realitas Sosial, Sosiologi

Abstract: This study examines the role of literature as a media for criticizing corruption as well as a reflection of social reality in the novel "Negeri Para Bedebah" by Tere Liye through the perspective of sociology of literature. The background of this research is based on the increasing relevance of literary works in representing social and political phenomena, particularly the practice of corruption in society. The purpose of this study is to analyze how the novel portrays corrupt practices and reflects social conditions through its plot and characters. The method used in this research is a qualitative method with a sociology of literature approach through textual analysis. The findings show that the novel successfully describes corruption as a systemic issue involving power relations, while also presenting social inequality and moral degradation within society. The discussion also highlights how the author uses storytelling as an effective means of social criticism toward corrupt systems. In conclusion, "Negeri Para Bedebah" functions not only as a literary work but also as a media of social criticism that reflects real-life conditions and encourages readers to be more aware of issues of corruption and social justice.

Keywords: Corruption, Literature, Social Reality, Sociology

Article info: Submitted: 12 January 2026 | Revised: 1 March 2026 | Accepted: 1 June 2026

PENDAHULUAN

Sastra bukan sekedar berfungsi sebagai karya imajinatif yang menghadirkan nilai estetika, melainkan sebuah refleksi dan respons terhadap kehidupan sosial dunia nyata. Sastra “menyajikan kehidupan” dan “kehidupan” sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra “meniru” alam dan dunia subjektif manusia (Ramadhina et al., 2025). Sebagai bagian dari budaya, sastra berfungsi sebagai cermin yang menggambarkan gambaran sosial, politik, dan ekonomi (Trianton, 2024). Salah satu persoalan yang kerap menjadi sorotan dalam karya sastra Indonesia adalah korupsi, yang tentunya menjadi masalah serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui sastra, pengarang dapat menyampaikan kritik terhadap praktik korupsi secara lebih halus namun tetap tajam. Sesuai dengan peran sastra yang dikenal dengan *dulce et utile* (indah dan berguna), sebuah karya

sastra perlu memberikan kontribusi yang relevan terkait dengan pembelajaran di kalangan masyarakat (Keguruan et al., 2022).

Pemilihan judul "Analisis Peran Sastra sebagai Media Kritik Korupsi dan Cermin Realitas Sosial dalam Novel *Negeri Para Bedebah* melalui Perspektif Sosiologi Sastra" didasari oleh urgensi untuk membedah bagaimana karya fiksi populer mampu menjadi media resistensi yang tajam terhadap sistem yang korup. Novel *Negeri Para Bedebah* karya Tere Liye dipilih karena secara berani dan eksplisit mengangkat tema kejahatan finansial, pencucian uang, dan kolusi antara penguasa dan pengusaha. Melalui tokoh Thomas, seorang konsultan keuangan profesional yang terjebak dalam pusaran skandal Bank Semesta milik pamannya, pengarang memotret dengan sangat telanjang bagaimana hukum dapat dibeli dan kebijakan negara dapat disetir oleh segelintir *elite*. Pemilihan judul ini merepresentasikan ketertarikan peneliti untuk melihat sastra bukan sekadar susunan kata, melainkan sebagai dokumen sosial yang merekam "kebedebahan" para pemangku kepentingan di negeri ini.

Novel *Negeri Para Bedebah* karya Tere Liye adalah salah satu karya fiksi yang secara gamblang membedah sisi gelap keuangan, politik, dan hukum. Melalui narasi yang penuh dengan makna, novel ini menggambarkan bagaimana jika kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, Sastra beralih fungsi menjadi media kritik sosial. Dalam perspektif sosiologi sastra, novel ini menarik dikaji karena memperlihatkan hubungan erat antara karya sastra dengan kondisi sosial masyarakat yang melahirkannya. Sosiologi sastra adalah bidang studi yang mengkaji interaksi antara kelompok komunitas dan karya sastra yang mencerminkan pola perilaku sosial (Andani et al., 2022).

Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang juga meneliti karya-karya dari Tere Liye, namun mayoritas masih berfokus pada aspek dan tujuan yang berbeda, contohnya (Wulandari, 2018) yang meneliti novel *Amelia* yang berfokus pada aspek diskriminasi, kemudian ada Novel *Rembulan Tenggelam di Wajahmu* yang diteliti oleh (Yati Dwi & Adita, 2017) lebih berfokus pada unsur Ilmu sastra yang terdapat di dalam novel tersebut. Dari penelusuran tersebut, ditemukan adanya *research gap* mengenai penelitian Novel karya Tere Liye. Belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti novel *Negeri Para Bedebah* sebagai media kritik sosial yang membahas permasalahan politik dan ekonomi yang diteliti melalui perspektif sosiologi sastra.

Penelitian ini menawarkan solusi berupa penguatan kesadaran kritis masyarakat melalui literasi sastra sebagai upaya non-penal dalam memberantas korupsi. Dengan membedah mekanisme kritik dalam novel *Negeri Para Bedebah*, pembaca diajak untuk mengenali pola-pola manipulasi sistemik yang sering kali luput dari pengamatan awam. Pentingnya penelitian ini terletak pada posisinya yang mengisi celah antara fakta sosiologis dan narasi fiksi; penelitian ini membuktikan bahwa sastra bukan sekadar hiburan, melainkan instrumen reflektif yang mampu membedah patologi sosial secara lebih mendalam dan emosional dibandingkan data statistik kriminalitas (Wiyatmi, 2013). Penggunaan perspektif sosiologi sastra menjadi krusial karena ia mampu menangkap esensi permasalahan yang tersembunyi di balik estetika bahasa (Ratna, 2015).

Berdasarkan latar belakang dan pengidentifikasian masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang dirumuskan. Pertama, untuk menggambarkan dengan jelas berbagai bentuk kritik mengenai tindakan kejahatan korupsi finansial dan oligarki politik yang ditampilkan oleh Tere Liye dalam karyanya *Negeri Para Bedebah*. Kedua, untuk menganalisis dan menunjukkan cara novel ini berperan sebagai refleksi dari realitas sosial yang mencerminkan keadaan penegakan hukum serta moralitas kalangan politisi di Indonesia saat ini melalui perspektif sosiologi sastra.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu sastra, khususnya dalam memperkaya kajian sosiologi sastra mengenai hubungan dialektis antara karya fiksi dan realitas korupsi di negara berkembang. Bagi masyarakat, penelitian ini berfungsi sebagai sarana edukasi politik yang persuasif, membantu warga negara untuk lebih peka terhadap isu-isu integritas dan keadilan sosial (Pradopo, 2021). Hasil analisis ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan karya sastra sebagai rujukan dalam memahami kompleksitas masalah bangsa, sehingga tercipta tatanan sosial yang lebih kritis dan bersih dari praktik lancung. Sastra yang bermutu harus mampu

memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan moralitas bangsa di tengah krisis integritas yang terjadi (Saryono, 2013).

METODE

Penelitian ini diawali dengan tahap identifikasi masalah dan penentuan fokus kajian sebagai dasar konseptual dalam memahami novel Negeri Para Bedebah karya Tere Liye. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bahwa korupsi dalam novel tidak hanya hadir sebagai tindakan kriminal personal, melainkan sebagai fenomena sosial yang beroperasi melalui struktur kekuasaan, manipulasi pengetahuan, dan legitimasi sosial (Foucault, 1980; Merton, 1968). Oleh karena itu, fokus kajian penelitian ditetapkan ke dalam tiga aspek utama.

Pertama, korupsi sebagai fenomena struktural (*structural corruption*), yaitu korupsi yang muncul sebagai hasil dari sistem sosial, politik, dan ekonomi yang memungkinkan serta mereproduksi praktik korupsi (Merton, 1968). Dalam konteks ini, tokoh-tokoh dalam novel dipahami bukan semata sebagai individu bermoral buruk, melainkan sebagai produk dari struktur kekuasaan yang koruptif dan praktik sosial yang terbentuk melalui habitus tertentu (Bourdieu, 1990).

Kedua, korupsi epistemik, yaitu bentuk korupsi yang bekerja melalui manipulasi informasi, produksi pengetahuan, dan pembentukan persepsi publik (Foucault, 1980). Fokus ini menyoroti bagaimana data, media, dan narasi dapat direayasa demi mempertahankan kepentingan tertentu serta bagaimana pengetahuan dapat menjadi instrumen kekuasaan.

Ketiga, korupsi dan legitimasi sosial, yaitu bagaimana praktik korupsi dinormalisasi melalui sistem, bahasa, dan institusi sehingga tindakan yang secara moral problematis justru tampak sah atau wajar dalam masyarakat (Bourdieu, 1991). Dalam konteks ini, legitimasi dipahami sebagai hasil reproduksi simbolik yang bekerja melalui relasi sosial dan kekuasaan.

Setelah fokus kajian ditentukan, tahap selanjutnya adalah penentuan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah novel Negeri Para Bedebah karya Tere Liye karena novel tersebut merepresentasikan dinamika kekuasaan, relasi ekonomi-politik, manipulasi sistem, dan kritik sosial terhadap praktik korupsi dalam masyarakat modern. Novel ini dipilih karena memiliki kompleksitas naratif yang memungkinkan pembacaan sosiologis secara mendalam, khususnya terkait korupsi struktural, manipulasi epistemik, dan legitimasi sosial. Dengan demikian, novel diposisikan sebagai teks sosial yang tidak hanya menyajikan cerita fiktif, tetapi juga merefleksikan realitas sosial dan struktur kekuasaan yang hidup dalam masyarakat (Damono, 1980).

Penelitian ini diawali dengan tahap identifikasi masalah dan penentuan fokus kajian sebagai dasar konseptual dalam memahami novel Negeri Para Bedebah karya Tere Liye. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bahwa korupsi dalam novel tidak hanya hadir sebagai tindakan kriminal personal, melainkan sebagai fenomena sosial yang beroperasi melalui struktur kekuasaan, manipulasi pengetahuan, dan legitimasi sosial (Foucault, 1980; Merton, 1968). Oleh karena itu, fokus kajian penelitian ditetapkan ke dalam tiga aspek utama.

Pertama, korupsi sebagai fenomena struktural (*structural corruption*), yaitu korupsi yang muncul sebagai hasil dari sistem sosial, politik, dan ekonomi yang memungkinkan serta mereproduksi praktik korupsi (Merton, 1968). Dalam konteks ini, tokoh-tokoh dalam novel dipahami bukan semata sebagai individu bermoral buruk, melainkan sebagai produk dari struktur kekuasaan yang koruptif dan praktik sosial yang terbentuk melalui habitus tertentu (Bourdieu, 1990).

Kedua, korupsi epistemik, yaitu bentuk korupsi yang bekerja melalui manipulasi informasi, produksi pengetahuan, dan pembentukan persepsi publik (Foucault, 1980). Fokus ini menyoroti bagaimana data, media, dan narasi dapat direayasa demi mempertahankan kepentingan tertentu serta bagaimana pengetahuan dapat menjadi instrumen kekuasaan.

Ketiga, korupsi dan legitimasi sosial, yaitu bagaimana praktik korupsi dinormalisasi melalui sistem, bahasa, dan institusi sehingga tindakan yang secara moral problematis justru tampak sah atau wajar dalam masyarakat (Bourdieu, 1991). Dalam konteks ini, legitimasi dipahami sebagai hasil reproduksi simbolik yang bekerja melalui relasi sosial dan kekuasaan.

Setelah fokus kajian ditentukan, tahap selanjutnya adalah penentuan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah novel *Negeri Para Bedebah* karya Tere Liye karena novel tersebut merepresentasikan dinamika kekuasaan, relasi ekonomi-politik, manipulasi sistem, dan kritik sosial terhadap praktik korupsi dalam masyarakat modern. Novel ini dipilih karena memiliki kompleksitas naratif yang memungkinkan pembacaan sosiologis secara mendalam, khususnya terkait korupsi struktural, manipulasi epistemik, dan legitimasi sosial. Dengan demikian, novel diposisikan sebagai teks sosial yang tidak hanya menyajikan cerita fiktif, tetapi juga merefleksikan realitas sosial dan struktur kekuasaan yang hidup dalam masyarakat (Damono, 1980).

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dengan metode baca dan catat. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah sumber primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber primer penelitian adalah teks novel *Negeri Para Bedebah*, sedangkan sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teori, dan referensi akademik yang berkaitan dengan sosiologi, kekuasaan, dan korupsi. Dalam memperkuat kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori utama, yaitu teori struktur sosial dari Robert K. Merton dalam *Social Theory and Social Structure* untuk memahami korupsi sebagai produk ketegangan sistemik; konsep *power/knowledge* dari Michel Foucault dalam *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* untuk menganalisis manipulasi informasi dan produksi kebenaran; serta teori *habitus*, modal, dan dominasi simbolik dari Pierre Bourdieu dalam *The Logic of Practice* untuk memahami legitimasi sosial atas praktik korupsi.

Teknik baca dilakukan secara intensif, berulang, dan kritis terhadap novel guna memahami keseluruhan isi teks, alur, tokoh, relasi kuasa, dan representasi sosial yang terkandung di dalamnya. Teknik catat dilakukan dengan menandai, mencatat, serta menginventarisasi kata, frasa, kalimat, dialog, maupun paragraf yang merepresentasikan tiga fokus kajian penelitian. Adapun langkah-langkah pengumpulan data meliputi: 1) membaca novel secara menyeluruh dan berulang; 2) mengidentifikasi bagian-bagian teks yang sesuai dengan fokus kajian; 3) mencatat dan menginventarisir data tekstual ke dalam format pengumpulan data; 4) mengumpulkan referensi sekunder berupa jurnal, buku teori, dan penelitian terdahulu; serta 5) menyeleksi data sekunder berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.

Tahap selanjutnya adalah klasifikasi data. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa teks novel *Negeri Para Bedebah* yang mencakup narasi, dialog, dan paragraf yang merepresentasikan korupsi struktural, korupsi epistemik, dan legitimasi sosial. Sementara itu, data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teori sosiologi, teori kekuasaan, dan teori praktik sosial yang berfungsi sebagai landasan konseptual dalam proses analisis. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian, memperjelas hubungan antara teks dan teori, serta memastikan bahwa penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan memiliki validitas akademik yang kuat.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan sosiologi sastra yang dikombinasikan dengan analisis isi. Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk mengungkap cerminan realitas sosial dari Masyarakat Indonesia. Sosiologi sastra tidak hanya mengkaji apa yang ada di dalam teks, melainkan juga berupaya memahami bagaimana teks tersebut diproduksi, didistribusikan, dan diterima dalam konteks sosial tertentu Faruk (1999). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat kita simpulkan bahwa karya sastra tidak hanya berhenti pada teks, melainkan terpaut pada lapisan-lapisan makna yang lebih mendalam dengan merepresentasikan kondisi sebenar Masyarakat dengan narasi fiksi.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni memilah dan memilih data yang telah dikumpulkan sesuai dengan relevansinya terhadap fokus penelitian. Pada tahap ini, data yang tidak berkaitan langsung dengan tema kritik korupsi dan representasi sosial dikeluarkan dari korpus analisis. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang menghubungkan kutipan-kutipan teks dengan konsep-konsep teoritis dalam sosiologi sastra. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan

interpretasi akhir berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data secara keseluruhan (Sugiyono, 2019).

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas hasil analisis, penelitian ini menerapkan Teknik triangulasi teori. Dalam teori ini ada tiga teori yang digunakan secara bersamaan, yakni teori sosiologi sastra dari Darmono dan Faruk, teori kritik sosial dari Ratna yang memandang sastra sebagai cermin realitas, dan Moleong yang menjelaskan bahwa teori triangulasi dapat menjelaskan aspek yang berbeda dari konsep yang sama. Dengan demikian, hasil interpretasi yang diperoleh memiliki landasan teoritis dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Setelah mendapat hasil peneliti melanjutkan interpretasi menyeluruh terhadap temuan-temuan yang telah diverifikasi. Interpretasi menonjolkan dua topik utama dari penelitian, yaitu berbagai macam kritik korupsi yang ada dalam narasi novel, dan cara novel tersebut menggambarkan realitas sosial-politik Indonesia. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola-pola yang konsisten dan berulang dalam data, sehingga menghasilkan generalisasi analitik yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian sosiologi sastra di Indonesia. Seluruh proses penelitian ini dirancang untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bersifat objektif, sistematis, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain yang menggunakan perspektif yang serupa.

Bagan Alur Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi Struktural: Ketika Sistem Menjadi Produsen Kejahatan Normalisasi Kejahatan dalam Struktur Finansial

Dalam cerita Negeri Para Bedebah, korupsi tidak muncul sebagai perilaku menyimpang satu atau dua orang pejabat. Sebaliknya, korupsi telah berubah menjadi kejadian struktural yang masif dan sistematis, semua tertata rapi dan melibatkan banyak orang (masif). Lewat tokoh utama, Thomas, Tere Liye (2012) mengungkapkan bahwa kejahatan kerah putih di dunia finansial adalah hasil langsung dari desain sistem yang bermasalah. Hal ini mencerminkan teori Robert K. Merton (1968) mengenai ketegangan struktur sosial. Merton berargumen bahwa dalam struktur yang sangat kompetitif dan materialistik, individu cenderung melakukan "inovasi". Dalam konteks ini, inovasi adalah perilaku menyimpang saat cara-cara konvensional tidak lagi cukup untuk mempertahankan kekuasaan atau mengumpulkan modal sehingga dilakukannya segala hal tidak lain penyimpangan.

Thomas, sebagai konsultan keuangan papan atas, sering menunjukkan bagaimana celah regulasi diciptakan sebagai jebakan. Korupsi struktural ini terjadi ketika lembaga yang seharusnya mengawasi, seperti bank sentral atau lembaga audit, justru menjadi bagian dari kejahatan itu. Setiadi (2018) menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia sering dipicu oleh regulasi yang tidak lengkap dan sengaja dipertahankan untuk memberi ruang bagi penyalahgunaan. Dalam novel, Bank Semesta bukan hanya bank yang bangkrut karena salah urus, melainkan instrumen yang sejak awal dirancang untuk menyerap dana masyarakat demi kepentingan elit pribadi.

Habitus dan Ranah Para Bedebah (Perspektif Bourdieu)

Secara sosiologis, kita dapat membahas perilaku para tokoh elit dalam novel ini menggunakan konsep habitus dan ranah dari Pierre Bourdieu (1990). Ranah ekonomi-politik dalam Negeri Para Bedebah digambarkan sebagai medan pertempuran di mana modal ekonomi dan modal sosial (koneksi) menjadi penentu segalanya. Habitus para "bedebah" adalah kecenderungan perilaku yang telah terinternalisasi lama; mereka telah terbiasa melihat hukum bukan sebagai batas moral, melainkan sebagai rintangan teknis yang bisa disiasati dengan uang atau pengaruh politik. Sa'diyah et al. (2023) menyebutkan bahwa hal ini menciptakan patologi ekonomi politik, di mana masyarakat modern kehilangan kepercayaan etis. Kepercayaan ini hilang karena yang ada justru memberikan imbalan bagi mereka yang paling mahir melakukan manipulasi.

Dalam satu adegan penting, Thomas menjelaskan betapa mudahnya memindahkan angka di atas kertas untuk menyembunyikan kerugian jutaan. Ini menunjukkan bahwa struktur perbankan global memiliki celah yang memungkinkan kejahatan terjadi tanpa terdeteksi oleh hukum. Kritik sosial yang diangkat oleh Tere Liye sangat tajam; ia menunjukkan bahwa "struktur" adalah mesin yang memproduksi kejahatan itu sendiri. Wiyatmi (2013) dalam sosiologi sastra mencatat bahwa karya ini berfungsi sebagai kritik terhadap bagaimana hukum sering tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, karena mereka yang berada di puncak struktur adalah mereka yang menulis aturan hukum.

Tabel 1. Identifikasi Temuan Korupsi Struktural dalam Novel

Tabel 1: Identifikasi Pembeda Korupsi Struktural dalam Novel			
o	Data / Kutipan Novel	H alaman	Analisis Sosiologis
	"Dunia keuangan itu sempit... Kita hanya perlu memindahkan angka dari satu saku ke saku lain..."	8 2	Inovasi (Merton): Penggunaan celah sistem untuk kepentingan finansial secara ilegal.
	"Aku mengenal hampir semua orang penting di gedung ini. Mereka berhutang budi padaku..."	1 45	Modal Sosial (Bourdieu): Jaringan kekuasaan yang digunakan sebagai alat barter hukum.
	"Bank ini dirancang untuk gagal sejak awal, agar dana talangan bisa dicairkan."	2 10	Patologi Ekonomi Politik: Lembaga yang didesain untuk merampok dana publik.

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan Tere Liye (2012), Merton (1968), dan Bourdieu (1990).

Hegemoni dan Konsensus Palsu

Lebih jauh lagi, korupsi struktural ini menciptakan hegemoni kekuasaan yang menyesakkan. Nuswantaria (2019) menjelaskan melalui perspektif Gramsci bahwa para elit dalam novel ini berhasil menciptakan "struktur palsu". Mereka meyakinkan masyarakat bahwa penyelamatan Bank Semesta melalui dana talangan adalah demi kepentingan nasional dan untuk mencegah krisis ekonomi yang akan menghancurkan rakyat kecil. Padahal, secara struktural, ini hanyalah skema untuk mencuci dosa para pemilik bank menggunakan uang pajak rakyat. Analisis wacana kritis (Firmansyah, 2018) menunjukkan bahwa kebijakan digunakan sebagai alat penindasan yang formal secara hukum, tetapi korup secara substansial.

Banalitas Kejahatan dan "Sekrup" Sistem Finansial

Menyambung analisis mengenai normalisasi, struktur korupsi dalam novel ini menunjukkan apa yang sering disebut sebagai objektifikasi kejahatan. Dalam pandangan sosiologi sastra (Damono, 1980), karya sastra merefleksikan bagaimana individu seringkali hanya menjadi "sekrup" dalam mesin besar yang korup. Thomas, meskipun memiliki kecerdasan luar biasa, pada awalnya terjebak dalam habitus yang menuntutnya untuk terus memutar uang tanpa mempedulikan etika. Wisnu W. et al. (2014) dalam penelitiannya terhadap novel ini mencatat bahwa kritik sosial yang ingin disampaikan adalah tentang bagaimana sistem birokrasi dan perbankan di Indonesia (yang direpresentasikan secara fiktif) telah kehilangan jiwa kemanusiaannya. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai noda, melainkan sebagai "biaya operasional" yang lumrah dalam menjaga stabilitas kekuasaan.

Kejahatan yang banal ini terlihat jelas ketika Thomas berinteraksi dengan para birokrat yang menganggap suap dan manipulasi data hanyalah bagian dari "protokol tidak tertulis". Dalam perspektif Damono (1980), hal ini menunjukkan bahwa sastra mampu menangkap fenomena sosiologis di mana individu kehilangan otonomi moralnya saat berhadapan dengan mesin kekuasaan. Thomas tidak perlu merasa menjadi orang jahat karena sistem di sekelilingnya melegitimasi bahwa "bertahan hidup" di dunia finansial memang membutuhkan kelenturan moral. Inilah yang membuat korupsi struktural begitu mematikan; ia menghapus rasa bersalah melalui rutinitas kerja harian yang terlihat profesional namun korup secara substansi.

Modal Sosial sebagai Alat Barter Hukum

Jika merujuk kembali pada Bourdieu (1990), kekuasaan Thomas bukan hanya terletak pada uang (modal ekonomi), melainkan pada kemampuannya mengelola modal sosial. Dalam *Negeri Para Bedebah*, kita melihat Thomas mampu menggerakkan jejaring raksasa—dari petinggi kepolisian hingga pemilik media—hanya dengan beberapa panggilan telepon. Hal ini memperkuat analisis Sa'diyah et al. (2023) bahwa patologi ekonomi politik dalam novel ini terjadi karena adanya "lingkaran setan" antar-elit. Struktur hukum yang seharusnya mandiri justru menjadi subordinat dari kepentingan modal. Pengejaran terhadap Thomas oleh pihak berwenang seringkali bukan karena penegakan hukum yang murni, melainkan karena Thomas dianggap mengancam kepentingan kelompok bedebah yang lain. Ini membuktikan bahwa dalam struktur yang korup, hukum hanya digunakan sebagai senjata untuk menyingkirkan lawan politik atau saingan bisnis.

Jaringan "bedebah" ini berfungsi sebagai asuransi bagi Thomas saat ia terdesak. Dalam novel, terlihat bagaimana modal sosial berubah menjadi instrumen untuk melakukan lobi-lobi gelap yang menundukkan hukum. Fenomena sirkuit kekuasaan ini membuktikan bahwa di *Negeri Para Bedebah*, kedaulatan hukum hanyalah ilusi. Para elit menggunakan modal sosial mereka untuk menciptakan "zona aman" di mana aturan hukum nasional tidak berlaku bagi mereka. Hubungan timbal balik antar-elit ini memastikan bahwa meskipun sistem diguncang krisis, posisi mereka tetap aman karena mereka saling memegang "kartu mati" satu sama lain, menciptakan stabilitas semu yang dibangun di atas tumpukan pelanggaran etika.

Dampak Anomie dan Runtuhnya Kontrak Sosial

Secara lebih luas, korupsi struktural ini memicu kondisi anomie, di mana aturan-aturan sosial yang ada tidak lagi mampu mengatur perilaku individu karena adanya ketidakadilan yang kasat mata. Sejalan dengan pemikiran Merton (1968), ketika masyarakat melihat bahwa cara-cara jujur tidak membuahkan hasil sementara para "bedebah" di puncak piramida hidup mewah melalui manipulasi, maka terjadi pergeseran standar moral. Sya'baan & Tike (2022) menjelaskan bahwa masalah sosial yang diangkat Tere Liye ini adalah cermin dari krisis kepercayaan publik. Struktur yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat (seperti dalam kasus penanganan Bank Semesta) justru digunakan untuk memproteksi aset para elit, yang pada akhirnya menciptakan jurang ketimpangan yang semakin lebar dan memicu apatisme massal terhadap keadilan.

Dampak paling nyata dari anomie ini adalah munculnya ketidakpedulian massal dari masyarakat. Ketika rakyat melihat bahwa tokoh-tokoh besar seperti pimpinan Bank Semesta bisa "bebas" melalui skema penyelamatan ekonomi, kontrak sosial antara negara dan warga negara menjadi robek. Masyarakat tidak lagi percaya pada keadilan institusional, melainkan mulai mengadopsi cara-cara pragmatis yang sama dengan para bedebah tersebut. Krisis kepercayaan publik ini adalah lubang hitam dalam sosiologi masyarakat modern; ketika kejujuran dianggap sebagai beban dan kecurangan dianggap sebagai strategi cerdas, maka secara struktural, bangsa tersebut sedang berjalan menuju kehancuran karakter yang permanen.

Korupsi Epistemik: Rekayasa Kebenaran dan Kuasa Wacana dalam Narasi Novel Power/Knowledge: Kebenaran sebagai Produk Kekuasaan

Subbab kedua ini mengeksplorasi dimensi korupsi yang lebih abstrak namun juga lebih berbahaya, yaitu korupsi epistemik. Jika korupsi struktural mencuri uang rakyat, maka korupsi epistemik mencuri "kebenaran" dari ruang publik. Thomas digambarkan sebagai ahli manipulasi informasi. Di sinilah relevansi pemikiran Michel Foucault (1980) tentang relasi Kekuasaan/Pengetahuan muncul. Foucault menegaskan bahwa kebenaran tidak pernah berdiri sendiri di luar kekuasaan; setiap masyarakat memiliki "rezim kebenaran" masing-masing. Dalam novel ini, Thomas bertindak sebagai perancang rezim kebenaran tersebut.

Korupsi epistemik terjadi ketika informasi dimanipulasi sehingga masyarakat tidak lagi bisa membedakan antara fakta objektif dan rekayasa opini. Salah satu jargon terkenal dari Thomas adalah bahwa "persepsi adalah realitas". Ia tidak memerlukan fakta bahwa Bank Semesta dalam keadaan sehat; ia hanya perlu membuat pasar percaya bahwa bank tersebut sehat. Penggunaan modal simbolik berupa kredibilitas Thomas sebagai pakar keuangan digunakan untuk membungkam skeptisisme publik. Sya'baan & Tike (2022) mencatat bahwa masalah sosial ini mencerminkan dunia nyata, di mana otoritas pengetahuan sering disalahgunakan untuk melindungi kepentingan sekelompok orang.

Manipulasi Wacana dan Media Massa

Dalam narasi novel, kita lihat bagaimana Thomas menggunakan media massa untuk menyebarkan "kebenaran" versinya. Dengan memanfaatkan koneksinya dengan jurnalis dan pemilik media, ia mampu mengubah narasi kegagalan sebuah bank menjadi kisah kepahlawanan ekonomi. Fenomena ini sejalan dengan analisis Faruk (1999) yang menyatakan bahwa teks sastra sering menggambarkan perjuangan ideologi. Dalam Negeri Para Bedebah, ideologi yang menang adalah yang paling mahir menguasai saluran informasi. Korupsi epistemik ini adalah bentuk "kekerasan simbolik" (Bourdieu, 1990), di mana publik secara sukarela menerima kebohongan karena dibungkus dalam terminologi ekonomi yang canggih dan otoritatif.

Thomas mengerti bahwa masyarakat awam memiliki akses terbatas terhadap pengetahuan tingkat tinggi. Ia memanfaatkan kesenjangan epistemik ini untuk menciptakan "kabut informasi". Julianto et al. (2024) menyoroti bahwa pandangan dunia pengarang dalam novel ini menunjukkan bahwa kejujuran intelektual telah hilang oleh pragmatisme kekuasaan.

Dengan teknik pengkajian fiksi (Nurgiyantoro, 2017), kita dapat melihat bahwa plot yang disusun Tere Liye menunjukkan bahwa siapa pun yang memegang narasi, dia yang akan menguasai dunia.

Tabel 2. Temuan Korupsi Epistemik dan Rekayasa Wacana

o	Data / Kutipan Novel	H alaman	Analisis Kuasa/Pengetahuan
	<i>"Bagi publik, persepsi adalah realitas. Jika kita bilang bank ini aman, maka dia aman."</i>	5 6	Power/Knowledge (Foucault): Siapa yang memegang narasi, dia menentukan kebenaran.
	<i>"Besok pagi, semua koran harus memuat berita bahwa bank ini korban konspirasi."</i>	1 89	Kekerasan Simbolik (Bourdieu): Penanaman ideologi palsu melalui kanal informasi.

"Gunakan istilah teknis yang rumit agar mereka percaya tanpa banyak bertanya."	34	2	Kesenjangan Pengetahuan: Memanfaatkan ketidaktahuan publik untuk legitimasi.
--	----	---	--

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan Tere Liye (2012), Foucault (1980), dan Bourdieu (1990).

Sastra sebagai Instrumen Dekonstruksi

Sebagai penutup, analisis korupsi epistemik dalam novel ini mengingatkan kita akan bahaya "kuasa wacana" yang tidak terkendali. Trianton (2024) menyebutkan bahwa sastra adalah medium untuk melestarikan nilai, namun dalam konteks ini, Negeri Para Bedebah berfungsi sebagai alat dekonstruksi. Tere Liye mengajak pembaca untuk merobek topeng-topeng kebenaran yang dihasilkan oleh otoritas. Keberhasilan Thomas dalam menyelamatkan Bank Semesta di akhir cerita bukanlah kemenangan moral yang bersih. Ini adalah kemenangan teknis dari manipulasi pengetahuan.

Ketimpangan epistemik yang digambarkan antara tokoh elit, seperti Thomas dan para politisi, dengan tokoh-tokoh "kecil", seperti petugas kepolisian atau wartawan idealis, menunjukkan bahwa di Negeri Para Bedebah, kebenaran hanyalah barang dagangan. Analisis ini menegaskan bahwa korupsi epistemik adalah akar dari segala bentuk korupsi lainnya. Ketika logika dan kebenaran bisa diperjualbelikan, keadilan struktural tidak akan pernah tercapai. Ratna (2015) menekankan bahwa penelitian sastra harus bisa mengungkap makna tersirat seperti ini untuk memberi pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi kemanusiaan kita di tengah kekacauan sistem kekuasaan modern.

Simulakra dan Hiperrealitas dalam Industri Keuangan

Dalam ranah korupsi epistemik, Thomas adalah maestro yang menciptakan "hiperrealitas". Ia tidak berurusan dengan fakta apakah Bank Semesta benar-benar bangkrut atau tidak, melainkan bagaimana ia membangun persepsi bahwa bank tersebut "tidak boleh bangkrut". Hal ini sejalan dengan metode penelitian kualitatif dalam sastra yang menekankan pada makna di balik teks (Sugiyono, 2019; Supriyanto, 2021). Thomas memanipulasi data sehingga tercipta simulasi kebenaran yang lebih dipercaya publik daripada realitas di lapangan. Korupsi epistemik di sini bekerja dengan cara mengaburkan batas antara kebohongan dan fakta, sehingga kebenaran menjadi sesuatu yang bisa dikonstruksi secara teknis oleh mereka yang memegang kendali pengetahuan.

Hiperrealitas ini tercipta melalui angka-angka di bursa saham yang tidak lagi mewakili nilai riil, melainkan mewakili "kepercayaan" yang dimanipulasi Thomas. Dalam dunia simulakra ini, kebenaran menjadi sangat cair dan tergantung pada siapa yang memegang kendali atas layar monitor. Thomas memahami bahwa masyarakat modern sangat bergantung pada representasi data. Dengan mengubah representasi tersebut, Thomas berhasil menciptakan realitas baru yang ditaati oleh pasar. Inilah inti dari korupsi epistemik: kemampuan untuk membuat kebohongan menjadi begitu indah dan meyakinkan sehingga kebenaran yang pahit tidak lagi diinginkan oleh siapapun.

Kekerasan Simbolik melalui Terminologi Teknis

Korupsi epistemik dalam novel ini juga dioperasikan melalui penggunaan bahasa. Thomas sering menggunakan istilah-istilah ekonomi yang rumit untuk membenarkan tindakan-tindakan ilegalnya. Ini adalah bentuk kekerasan simbolik (Bourdieu, 1990), di mana publik dipaksa menerima sebuah kebijakan karena mereka merasa tidak memiliki kompetensi intelektual untuk mendebatnya. Faruk (1999) menyebutkan bahwa dalam sosiologi sastra, penguasaan terhadap wacana adalah bentuk dominasi kelas. Dengan membuat publik merasa "bodoh" atau "tidak tahu apa-apa" tentang seluk-beluk finansial, para elit bedebah dapat dengan bebas menjalankan skema korupsinya tanpa ada protes yang signifikan. Pengetahuan tidak lagi digunakan untuk pencerahan, melainkan sebagai alat untuk membungkam skeptisisme.

Terminologi ekonomi yang rumit berfungsi sebagai "tembok intelektual" yang memisahkan rakyat awam dari kebijakan yang merugikan mereka. Penggunaan bahasa yang teknokratis ini membuat publik merasa inferior dan enggan untuk mengkritik, karena merasa tidak cukup cerdas untuk memahami kerumitan masalahnya. Kekerasan simbolik ini sangat efektif karena bersifat *invisible*; masyarakat tidak merasa ditindas, melainkan merasa memang sudah seharusnya mereka diam dan mengikuti arahan sang pakar. Thomas memanfaatkan superioritas pengetahuannya bukan

untuk mengedukasi, melainkan untuk menjaga jarak agar kekuasaannya tetap tidak tergoyahkan oleh kritik publik.

Media Massa sebagai Ruang Kontestasi Kebenaran yang Terdistorsi

Korupsi epistemik mencapai puncaknya ketika media massa tidak lagi menjadi pilar keempat demokrasi, melainkan menjadi alat humas bagi para kapitalis. Dalam narasi Tere Liye, Thomas memanfaatkan media untuk menyebarkan narasi heroik tentang dirinya dan Bank Semesta. Analisis wacana kritis dari Firmansyah (2018) menunjukkan bahwa media dalam novel ini berfungsi sebagai instrumen hegemoni untuk menciptakan konsensus palsu. Kebenaran yang sampai ke telinga rakyat adalah kebenaran yang sudah disaring, diedit, dan dibungkus sedemikian rupa demi kepentingan pasar. Penutup dari subbab ini menegaskan bahwa tanpa adanya kejujuran intelektual, segala bentuk reformasi struktural akan sia-sia, karena para penguasa wacana akan selalu menemukan cara untuk memanipulasi logika publik demi melanggengkan status quo.

Kontestasi kebenaran di media dalam novel ini selalu dimenangkan oleh mereka yang memiliki anggaran iklan dan koneksi politik terbesar. Media massa tidak lagi melakukan fungsi *check and balances*, melainkan menjadi alat pencitraan yang sangat masif. Melalui manipulasi narasi, kejahatan finansial yang dilakukan Thomas dibungkus sebagai "langkah patriotik" untuk menyelamatkan ekonomi. Hal ini menciptakan distorsi ruang publik yang sangat parah, di mana opini publik dibentuk oleh algoritma kepentingan elit. Penutup analisis ini menegaskan bahwa selama media massa masih menjadi bagian dari jaringan bedebah, kebenaran epistemik akan selalu menjadi barang langka yang harganya tak terjangkau oleh kejujuran.

Legitimasi Sosial Korupsi: Habitus, Modal, dan Dominasi Simbolik

Dalam novel Negeri Para Bedebah, praktik korupsi tidak hanya digambarkan sebagai tindakan individu semata, melainkan telah menjadi bagian dari sistem sosial yang dilegitimasi oleh kekuasaan, uang, dan jaringan elit (Tere Liye, 2012; Setiadi, 2018). Melalui pendekatan sosiologi Pierre Bourdieu, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep habitus, modal, dan dominasi simbolik (Bourdieu, 1990). Konsep habitus terlihat dari perilaku para tokoh elit politik, pengusaha, dan pejabat yang menganggap praktik manipulasi, suap, serta permainan kekuasaan sebagai sesuatu yang biasa. Kebiasaan tersebut terbentuk dari lingkungan sosial yang terus menerus mempertahankan budaya korupsi (Faruk, 1999). Dalam novel, para pelaku kejahatan ekonomi tidak merasa bersalah karena tindakan mereka dianggap wajar dalam dunia kekuasaan dan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi bagian dari pola pikir kolektif masyarakat elit (Nuswantaria, 2019). Selain habitus, praktik korupsi dalam novel juga didukung oleh kepemilikan berbagai bentuk modal. Modal ekonomi tampak melalui kekayaan dan kekuatan finansial yang dimiliki para tokoh untuk mempengaruhi keputusan politik maupun hukum (Merton, 1968).

Modal sosial terlihat dari jaringan relasi antara pejabat, pengusaha, media, dan aparat penegak hukum yang saling melindungi kepentingan masing-masing. Sementara itu, modal simbolik muncul melalui status sosial, jabatan, dan citra terhormat yang membuat masyarakat sulit mempertanyakan tindakan mereka (Bourdieu, 1990). Dominasi simbolik terjadi ketika masyarakat menerima praktik ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal. Tokoh-tokoh berkuasa dalam novel menggunakan bahasa, media, dan pengaruh politik untuk membangun legitimasi atas tindakan mereka (Foucault, 1980; Firmansyah, 2018). Kekuasaan tidak lagi dijalankan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui pengaruh simbolik yang membuat masyarakat tunduk tanpa sadar. Dengan demikian, novel ini memperlihatkan bahwa korupsi dapat bertahan karena adanya sistem sosial yang mendukung dan melegitimasi praktik tersebut. Melalui gambaran tersebut, Negeri Para Bedebah memberikan kritik sosial terhadap realitas Indonesia, di mana korupsi sering kali melibatkan kolaborasi antara kekuasaan politik, ekonomi, dan media (Sya'baan & Tike, 2022; Sa'diyah et al., 2023). "Pandangan tersebut sejalan dengan teori Lucien Goldmann yang menyatakan bahwa karya sastra merupakan refleksi struktur sosial dan pandangan dunia masyarakat tertentu (Goldmann, 1975)."

Novel ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga persoalan struktur sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 3. Bentuk-Bentuk Korupsi dalam Novel Negeri Para Bedebah dan Landasan Teori

Aspek Korupsi	Bentuk korupsi	Manifestasi Dalam Novel Negeri Para Bedebah	Landasan Teori
Aspek Politik "Korupsi di gunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan politik"	Suap "Pemberian uang atau fasilitas untuk mempengaruhi keputusan politik maupun hukum"	"Tokoh elit menganggap korupsi sebagai hal biasa, para pejabat dan pengusaha tidak merasa bersalah karena praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam dunia kekuasaan"	Habitus "Kebiasaan dan Pola pikir yang terbentuk dari lingkungan sosial sehingga korupsi dianggap wajar"
Aspek Ekonomi "Kekayaan dan modal finansial dipakai untuk menyuap, memanipulasi hukum, dan memperkuat kepentingan kelompok elit"	Manipulasi Kekuasaan "Penyalahgunaan jabatan dan wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok"	"Adanya relasi kuat elit, pengusaha, media, dan aparat hukum saling bekerjasama untuk mempertahankan kekuasaan dan menutupi kejahatan ekonomi"	Modal(Capital) "Terdiri dari modal ekonomi, modal sosial, dan modal simbolik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan"
Aspek Sosial-budaya "Korupsi dianggap sebagai kebiasaan yang normal dalam lingkungan elit sehingga menjadi budaya yang terus diwariskan"	Kolusi/Jaringan Elit "Kerjasama antara pejabat, pengusaha, media, dan aparat hukum untuk saling melindungi kepentingan"	"Dominasi simbolik terhadap masyarakat, tokoh berkuasa menggunakan media, bahasa, dan status sosial untuk membuat masyarakat menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal"	Dominasi Simbolik "Bentuk kekuasaan yang bekerja melalui pengaruh simbol, status, bahasa, dan media sehingga masyarakat tunduk tanpa paksaan fisik"

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan Tere Liye (2012), Merton (1968), Foucault (1980), Bourdieu (1990)

Novel Negeri Para Bedebah sebagai Cermin Realitas Sosial Indonesia: Perspektif Sosiologi Sastra

Novel Negeri Para Bedebah dapat dipahami sebagai cerminan realitas sosial Indonesia karena menggambarkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya korupsi, mafia hukum, manipulasi politik, dan penyalahgunaan kekuasaan (Damono, 1980).

Dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra tidak lahir secara terpisah dari masyarakat, melainkan menjadi refleksi kondisi sosial, budaya, dan politik pada zamannya (Wellek & Warren, 1990). Melalui cerita yang penuh intrik politik dan ekonomi, Tere Liye menghadirkan gambaran mengenai lemahnya sistem hukum dan kuatnya pengaruh elit kekuasaan dalam menentukan kebijakan negara. Tokoh-tokoh dalam novel memperlihatkan bagaimana hukum dapat dipermainkan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Situasi tersebut mencerminkan realitas sosial Indonesia, di mana kasus korupsi sering melibatkan pejabat tinggi, pengusaha, serta jaringan politik tertentu (Ratna, 2015). Dari sudut pandang sosiologi sastra, novel ini juga berfungsi sebagai media kritik sosial. Tere Liye menggunakan alur cerita dan karakter untuk menyampaikan kritik terhadap ketimpangan sosial, praktik kolusi, nepotisme, dan manipulasi media. Kritik tersebut tidak disampaikan secara langsung seperti dalam pidato politik, tetapi melalui konflik dan dialog antar tokoh sehingga pembaca dapat memahami kondisi sosial yang sedang dikritik (Faruk, 1999). Selain sebagai kritik sosial, novel ini menunjukkan bagaimana masyarakat sering berada dalam posisi lemah di hadapan kekuasaan. Media massa dalam novel digambarkan dapat diarahkan untuk membentuk opini publik sesuai kepentingan elit tertentu. Hal tersebut memperlihatkan bahwa realitas sosial tidak

selalu dibentuk oleh kebenaran, tetapi juga oleh kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan dan akses informasi.

Dengan demikian, Negeri Para Bedebah tidak hanya berfungsi sebagai karya hiburan, tetapi juga sebagai refleksi kondisi sosial Indonesia. Novel ini menggambarkan bagaimana praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan telah menjadi persoalan struktural yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Melalui pendekatan sosiologi sastra, pembaca dapat memahami bahwa karya sastra memiliki hubungan erat dengan realitas sosial dan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi masyarakat.

Tabel 4. Realitas Sosial dalam Novel Negeri Para Bedebah dan Landasan Teori

Data/Kutipan Novel	Landasan Teori
korupsi dan kekuasaan <i>"Di negeri ini, uang bisa membeli apa saja. Termasuk hukum dan kekuasaan."</i>	Wellek dan Warren <i>"Sastra mencerminkan kondisi sosial masyarakat, termasuk praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan."</i>
Konflik kepentingan elit <i>"Mereka bukan sedang menyelamatkan negara, mereka sedang menyelamatkan kepentingan masing-masing."</i>	Lucien Goldmann <i>"Novel menunjukkan pandangan kritis terhadap elit politik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi."</i>
Jaringan kekuasaan <i>"Permainan besar selalu melibatkan banyak tangan yang saling melindungi."</i>	Pierre Bourdieu <i>"Media digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membentuk opini publik sesuai kepentingan elit."</i>

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan Tere Liye (2012), Wellek & Warren (1990), Goldmann (1975), Bourdieu (1990)

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa novel Negeri Para Bedebah karya Tere Liye berhasil menjalankan fungsi ganda sebagai karya sastra dan media kritik sosial yang tajam terhadap praktik korupsi di Indonesia. Melalui perspektif sosiologi sastra, ditemukan tiga bentuk representasi korupsi dalam narasi novel, yaitu korupsi struktural yang beroperasi melalui disfungsi institusi dan relasi kuasa antara penguasa dan pebisnis, korupsi epistemik yang bekerja melalui manipulasi informasi dan rekayasa wacana publik, serta korupsi yang memperoleh legitimasi sosialnya melalui mekanisme habitus dan dominasi simbolik dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan, novel ini terbukti mampu merepresentasikan realitas sosial-politik Indonesia secara mendalam, khususnya menyangkut lemahnya penegakan hukum dan rendahnya moralitas kalangan elite, sehingga karya fiksi ini berfungsi sebagai cermin yang memantulkan kondisi nyata bangsa dan sekaligus sebagai instrumen penyadaran kritis bagi pembacanya.

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti menyarankan agar kajian sosiologi sastra terhadap karya-karya fiksi populer Indonesia, khususnya yang mengangkat tema korupsi dan ketimpangan sosial, terus dikembangkan secara lebih sistematis sebagai bagian dari upaya literasi kritis masyarakat. Bagi pendidik dan pemangku kebijakan di bidang pendidikan, novel Negeri Para Bedebah dapat dijadikan bahan ajar sastra yang relevan untuk menumbuhkan kesadaran antikorupsi di kalangan pelajar dan mahasiswa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan metode perbandingan lintas karya atau pendekatan resepsi sastra guna mengukur sejauh mana pesan-pesan kritik sosial dalam novel ini benar-benar diterima dan diinternalisasi oleh pembacanya dalam konteks kehidupan sosial yang nyata.

REFERENSI

- Andani, N. S., Raharjo, R. P., & Indarti, T. (2022). KRITIK SOSIAL DAN NILAI MORAL INDIVIDU TOKOH UTAMA DALAM NOVEL LAUT BERCERITA KARYA LEILA S. CHUDORI.
- Andi Muh. Ruum Sya'baan, L. T. (2022). MASALAH-MASALAH SOSIAL DALAM NOVEL NEGERI PARA BEDEBAH DAN NEGERI DI UJUNG TANDUK.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Damono, S. D. (1980). *Sosiologi sastra: Sebuah pengantar ringkas*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Faruk. (1999). *Pengantar sosiologi sastra: dari strukturalisme genetis sampai post-modernisme*. Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, M. B. (2018). Dimensi sosial dalam novel Negeri Para Bedebah karya Tere Liye (perspektif analisis wacana kritis). *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(2), 256-267.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977*. Pantheon Books.
- I. R. Julianto, T. Supriyanto, and M. Doyin. (2024) "Pandangan dunia pengarang dan kesalehan sosial dalam kumpulan puisi Rahman Rahim Cinta karya Emha Ainun Nadjib." *Literasi: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajarannya*, 14(1), 250-256.
- Keguruan, F., Oleo, U. H., Hijau, K., Tridharma, B., Kambu, K., & Kendari, K. (2022). *Masalah-Masalah+Sosial+(1)*. 7(3).
- Liye, T. (2012). *Negeri Para Bedebah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis Fheti Wulandari. (2018). Analisis Diskriminasi pada Novel "Amelia" Karya Tere-Liye. *Journal of Science and Social Research*, 1(February), 53-59.
<http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Goldmann, L. (1975). *Towards a sociology of the novel*. Tavistock Publications.
- Merton, R. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Nizar Halimatus Sa'diyah, Moch. Syahri, & Nita Widiati. (2023). Patologi Ekonomi Politik Masyarakat Modern dalam Trilogi Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), 1044-1067. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2894>
- Nurgiyantoro, B. (2017). *Teori Pengkajian Fiksi*. Gadjah Mada University Press.
- Nuswantaria, I. (2019). Analisis Hegemoni Dalam Dwilogi Novel Negeri Para Bedebah Karya Tere Liye (perspektif Antonio Gramsci). *EDU-KATA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(2), 177-186.
- Pradopo, R. D. (2021). *Prinsip-prinsip kritik sastra*. Gadjah Mada University Press.
- Ramadhina, S., Noper, A. D., & Supena, A. (2025). Kajian Sosiologi Sastra terhadap Konflik, Kritik Sosial, dan Moral dalam Film Gundala (2019) Karya Joko Anwar. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 5(3), 2530-2536. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v5i3.1737>
- Ratna, N. K. (2015). *Teori, metode, dan teknik penelitian sastra*. Pustaka Pelajar.
- Saryono dan Mekar Dwi Anggraeni. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Wicipto. (1), 430-439.
- Sugiyono, S. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta, 69.
- Supriyanto, T. (2021). *Metodologi penelitian sastra*. UNNES Press.
- Trianton, T. (2024). Sastra sebagai Medium Konservasi Nilai Budaya. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 20, 363-369. <https://doi.org/10.30595/pssh.v20i.1388>
- Wellek Renne Dan Austin Warren. 1990. *Teori Kesusastraan (Diterjemahkan Oleh Melani Budianta)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Wisnu W., M. H., Sufanti, M., & Santoso, H. D. (2014). "Kritik sosial dalam novel Negeri Para Bedebah karya Tere Liye: Tinjauan sosiologi sastra dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

- Wiyatmi. (2013). *Sosiologi sastra: Teori dan kajian terhadap sastra Indonesia*. Kanwa Publisher.
- Yati Dwi, Y., & Adita, W. P. (2017). Semiotika dalam novel Rembulan Tenggelam Di Wajahmu Karya Tere Liye. *Jurnal Literasi*, 1(2), 65–72.